



Kecak
Bali
Vol. I/2024

KECAK BALI

Keadaan Cakrawala Bali




REALISASI
APBN
SARBAGITA

SEMESTER II TAHUN 2023

KPPN Denpasar Raih
Sertifikat ISO SMAP
37001:2016

Pelaksanaan Akhir
Tahun Anggaran 2023

Tak Hanya Kasir, KPPN Kini
"Bestie" Satker K/L Dan Pemda

A portrait of Trimo Yulianto, a middle-aged man with glasses, wearing a white short-sleeved button-down shirt and a dark batik headband. He is standing with his hands clasped in front of him. The background is a plain, light-colored wall.

Trimo Yulianto

Kepala KPPN
Denpasar

Sekapur Sirih

Tahun anggaran 2023 telah dilewati oleh KPPN Denpasar dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah. Berbagai capaian telah diraih dengan berbagai tantangan dan kendalanya. Buletin KECAK BALI (KEadaan CAKrawala BALI) kembali hadir sebagai sarana publikasi kinerja KPPN Denpasar sebagai Treasurer, Regional Chief Economist, dan Financial Advisory.

Informasi yang disajikan dalam buletin kiranya dapat memberikan gambaran kepada para pembaca mengenai kontribusi dan peran KPPN Denpasar dalam mengawal APBN di wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) dan mewujudkan layanan Perbendaharaan yang cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan tanpa biaya.



Contents

07

**Bukti Nyata Realisasi Belanja
APBN Lingkup KPPN Denpasar**

12

**Realisasi Transfer ke Daerah
Lingkup KPPN Denpasar
Periode Semester II Tahun 2023**

18

**Rekam Peristiwa Kegiatan
KPPN Denpasar Semester II
Tahun 2023**

22

**Wujud Komitmen Kuat
Implementasikan Layanan Tanpa
Suap, KPPN Denpasar Raih
Sertifikat ISO SMAP 37001:2016**



24

RPATA: Transformasi Pengelolaan Keuangan untuk Meningkatkan Efisiensi dan Akuntabilitas

26

Lika-liku Perjalanan Akhir Tahun

28

Penyampaian dan Validasi LPJ Bendahara melalui Aplikasi SAKTI

30

Tak Hanya Kasir, KPPN Kini “Bestie” Satker K/L dan Pemda

33

Optimalisasi Penyaluran Usaha Mikro (UMi)

37

Teka Teki Silang

A photograph of a person breathing fire during a traditional Balinese ceremony. The person is shirtless and wearing a patterned sarong. A large, bright plume of fire is being breathed out from their mouth, rising into the dark, cloudy sky. In the background, other people and structures are visible, including a tall, thin structure with a flag. The overall scene is dramatic and captures a moment of cultural performance.

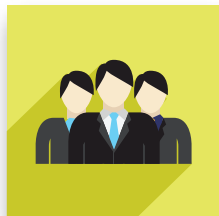
s.d Semester II Tahun 2023,

97,23%

Realisasi Belanja di Wilayah Bali disalurkan oleh

KPPN Denpasar

Realisasi Belanja Wilayah SARBAGITA Periode Semester II Tahun 2023



Belanja Pegawai

Pagu	Belanja
3,2 T	3,1 T



Belanja Bansos

Pagu	Belanja
18,1 M	18,1 M



Belanja Barang

Pagu	Belanja
4,1 T	3,9 T



Transfer ke Daerah

Pagu	Belanja
6,1 T	6 T



Belanja Modal

Pagu	Belanja
2,3 T	2,1 T

Dengan rincian penyaluran sebanyak 82.258 SP2D atas jumlah penerima 1.096.632 dari 263 Satuan Mitra Kerja KPPN Denpasar.

Overview pelaksanaan Tahun 2023 :



Nilai transaksi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebesar 19,6 Miliar Rupiah menunjukkan tren peningkatan dari tahun sebelumnya yakni 26%



Pemanfaatan penggunaan *Marketplace-Digipay* Satu meningkat sejumlah 368 Juta Rupiah atau sebesar 41,2%



Ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara, Rekonsiliasi Eksternal, dan Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dengan rata-rata 99%



Pembangunan

DERMAGA KENAVIGASIAN BENOA

Dermaga Kenavigasian Benoa adalah dermaga kenavigasian pertama dan satu-satunya di Provinsi Bali. Kapal-kapal negara yang sebelumnya melakukan labuh jangkar sekarang memiliki dermaga khusus untuk bersandar sehingga efisiensi biaya pemeliharaan dan perawatan kapal serta fleksibilitas pelaksanaan kegiatan operasional kenavigasian seperti *dropping* BBM dan pengiriman logistik semakin optimal.

Pembangunan dermaga ini merupakan Proyek Strategis Nasional yang dikerjakan selama 2 tahun dengan pengguna fasilitas hasil proyek meliputi beberapa K/Lyang memiliki kapal negara selain Distrik Navigasi Benoa seperti TNI, Polri, Basarnas, Bea dan Cukai, serta KSOP.

Data Teknis



Panjang dermaga 96 meter



Kapasitas dermaga untuk 20 kapal negara



Satker pelaksana proyek : Distrik Navigasi Benoa



Tanggal selesai proyek : Desember 2023



Biaya Pembangunan : 82 Miliar dari APBN



Pembangunan

DERMAGA KEDISAN DI DANAU BATUR

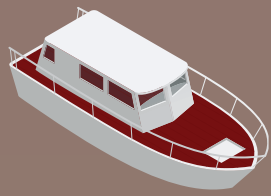
Latar belakang pengerjaan pembangunan dermaga bermula dari usulan masyarakat sekitar agar aksesibilitas transportasi ke Desa Trunyan di Danau Batur semakin meningkat. Renovasi dan revitalisasi dermaga diharapkan mendongkrak eksistensi wisata kuburan di Desa Trunyan maupun Danau Batur dan menarik perhatian wisatawan sehingga fokus pariwisata tidak hanya pada kafe kekinian di wilayah Kintamani.

Konstruksi dermaga yang sebelumnya dari kayu dan tidak ramah penumpang kapal diubah menjadi dermaga apung yang fleksibel mengikuti pasang surut air danau. Pembangunan dermaga yang merupakan pekerjaan Prioritas Nasional ini terbukti meningkatkan faktor keselamatan dan kenyamanan penumpang. Nantinya Dermaga Kedisan juga akan dilengkapi dengan amphiteater pada sisi darat dermaga yang digunakan untuk kegiatan kesenian.

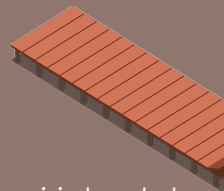
Data Teknis



Panjang Dermaga
165 meter



Menampung 12
kapal/fast boat



Luas sisi darat dermaga
5.775 m² dengan
luas sisi perairan 4.950 m²



Satker pelaksana proyek : Balai Pengelola Transportasi Darat Bali



Tanggal selesai proyek : Dermaga apung selesai akhir tahun 2022 dan fasilitas sisi darat selesai November 2024



Biaya Pembangunan : 33 Miliar dari APBN

KLINIK POLTRADA

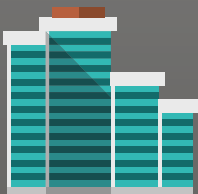
Pembangunan

GEDUNG KELAS DAN POLIKLINIK POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI

Politeknik Transportasi Darat Bali yang didirikan tahun 2019 terus melengkapi infrastruktur utama penunjang kegiatan pembelajaran agar masing-masing program studi memiliki gedung belajar mandiri. Pembangunan gedung kelas ke-3 ini juga didasarkan pada semakin meningkatnya jumlah taruna.

Selain itu, pembangunan poliklinik pertama di lingkungan kampus akan memberikan pelayanan kesehatan untuk sivitas akademika serta masyarakat umum. Poliklinik ini nantinya akan menggunakan tenaga kesehatan internal kampus dan menjadi Klinik Pratama berbentuk BLU yang memiliki penerimaan negara.

Data Teknis



Gedung kelas 5 lantai
dengan luas 2294 m²



Gedung poliklinik 2 lantai
dengan luas 1266 m²



Satker pelaksana proyek : Politeknik Transportasi Darat



Tanggal selesai proyek : Gedung kelas proses penyelesaian,
poliklinik Januari 2024



Biaya Pembangunan Gedung Kelas : 36 Miliar dari SBSN

Biaya Pembangunan Poliklinik : 13 Miliar dari APBN



Pembangunan

JEMBATAN RUAS SP. COKROAMINOTO – SP. TOHPATI DI JALAN GATOT SUBROTO TIMUR

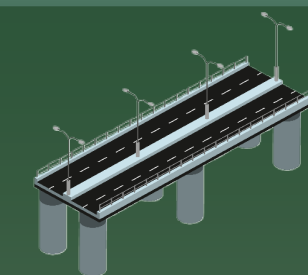
Latar belakang pelaksanaan proyek ini menitikberatkan pada lokasi jembatan yang berada pada ruas jalan utama logistik Pulau Bali dengan arus lalu lintas padat. Selain itu, titik masuk dan keluar jembatan yang menyempit (*bottle neck*) sepanjang 7 meter dengan rangka baja sering mengakibatkan kemacetan pada periode tertentu.

Oleh karena itu, penggantian 3 jembatan sepanjang ruas jalan ini diusulkan oleh Gubernur Provinsi Bali dalam rangka memperlancar kegiatan logistik masyarakat sehingga meningkatkan konektivitas antar kawasan khususnya di Provinsi Bali serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

Data Teknis



Lebar jembatan : 9 meter
Jembatan Tukad Bindu 53,5 meter
Jembatan Tukad Ayung 63,5 meter
Jembatan Tukad Penatih 63,5 meter



Konstruksi girder beton



Satker pelaksana proyek : Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah III Provinsi Bali



Tanggal selesai proyek : Februari 2023



Biaya Pembangunan : 109 Miliar dari SBSN

Realisasi Transfer ke Daerah Lingkup KPPN Denpasar Periode Semester II Tahun 2023

Dana Transfer Umum

Dana Alokasi Umum (DAU)

3,6 T

100% dari pagu

DAU ini juga termasuk DAU Tambahan bagi 3 pemerintah daerah untuk mendukung pendanaan pembayaran THR dan Gaji ke-13 ASN Guru Daerah yang tidak menerima tambahan penghasilan.

Dana Bagi Hasil (DBH)

304,2 M

99,93% dari pagu

Pembayaran atas Kurang Bayar DBH disalurkan secara non tunai melalui *Treasury Deposit Facility* (TDF) di Rekening Lain BI TDF masing-masing pemerintah daerah.



Dana Transfer Khusus

Dana Alokasi Khusus Fisik

141,5 M

100% dari kontrak

Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

736,1 M

98,23% dari pagu

Dengan total penyaluran kepada 5.416 sekolah dan 1.215.707 siswa untuk Alokasi Reguler, Kinerja, dan Cadangan secara bertahap.

Dana Alokasi Khusus Non Fisik

637,9 M

98,84% dari pagu

Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan

Dana Desa

267,6 M

99,92% dari pagu

Tersalur Dana Desa Tambahan untuk 58 desa dengan alokasi 7,9 Miliar Rupiah sesuai dengan hasil kinerja pemerintah desa atas pengelolaan keuangan yang sangat baik.

Insentif Fiskal

197,6 M

100% dari pagu





DAK Fisik

Proyek pembangunan jalan usaha tani sektor tanaman pangan pada Subak Lungtad, Desa Peguyangan Kangin, Kota Denpasar

500 Juta

Dana Desa

Melalui kelompok ternak unggas Lestari di Desa Bajera, Kabupaten Tabanan telah diberikan 300 ekor beserta kandang baterai, pakan, bibit ayam, dan obat-obatan.

306 Juta





BOP Kesetaraan

Pelaksanaan ujian keterampilan pilihan dimana perempuan *mejejaitan* dan yang laki-laki membuat kelakar di SPNF SKB Kabupaten Badung

1 Juta



DAU Pekerjaan Umum

Peningkatan jalan lingkungan di Kelurahan Sesean, Kota Denpasar

995 Juta



Dialog Sejarah dan Wawasan Kebangsaan Refleksi Diri dalam Merevitalisasi Mental Pegawai

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya”

Sebuah **quotes** legendaris yang kerap digelorkan oleh Bapak Proklamator, Ir. Soekarno, dalam orasi dan pidatonya. Selaras dengan harapan Bung Karno yang menginginkan generasi penerus bangsa selalu mengingat sejarah, KPPN Denpasar telah melaksanakan kegiatan Dialog Sejarah dan Wawasan Kebangsaan ke Istana Kepresidenan Tampaksiring, Gianyar, Bali pada hari Minggu, 17 Desember 2023.

Perjalanan menuju Istana Kepresidenan Tampaksiring memakan waktu kurang lebih 40 menit dari pusat kota Denpasar. Istana Kepresidenan Tampaksiring dibangun pada masa pemerintahan Bung Karno lokasinya tepat di sebelah Pura Tirta Empul. Mulanya, Istana Kepresidenan Tampaksiring sebagai tempat peristirahatan bagi Presiden Republik Indonesia beserta keluarga maupun untuk menjamu tamu negara. Namun, seiring berjalannya waktu, fungsi dari Istana Kepresidenan Tampaksiring mengalami perkembangan. Selain sebagai tempat pelaksanaan kegiatan Kepresidenan, Istana Kepresidenan Tampaksiring juga berfungsi sebagai tempat wisata sejarah. Masyarakat umum dapat mengunjungi Istana Kepresidenan Tampaksiring pada waktu – waktu tertentu.





Kawasan Istana Kepresidenan Tampaksiring terdiri dari lima gedung utama dan satu pendopo. Dua gedung utama diberi nama Wisma Merdeka dan Wisma Negara yang dihubungkan oleh Jembatan Penghubung sepanjang 40 meter dan lebar 1,5 meter, tiga gedung utama lainnya Wisma Yudhistira, Wisma Bima, dan ruang konferensi serta Balai Wantilan. Suasana di dalam Kawasan Istana Kepresidenan Tampaksiring sangat asri, banyak tumbuhan langka yang tumbuh subur. Selain tanah dan bangunan, di sisi depan Kawasan Istana Kepresidenan Tampaksiring juga terdapat hewan peliharaan yaitu dua jenis rusa yang berasal dari Istana Kepresidenan Bogor.

Istana Kepresidenan Tampaksiring merupakan salah satu aset sejarah bangsa

yang patut untuk dilestarikan dan dikunjungi oleh semua kalangan. Setelah kegiatan Dialog Sejarah dan Wawasan Kebangsaan ini terlaksana, para pegawai KPPN Denpasar jadi lebih memahami sejarah Istana tersebut dan menjadi refleksi diri dalam merevitalisasi mental masing-masing pegawai.





Juli

7



Bimtek Aplikasi Digipay Satu Tahap IV
11 Juli 2023

Agustus

8

Rekam Peristiwa

*Kegiatan KPPN Denpasar
Semester II Tahun 2023*



Penjor: Penyerapan Anggaran dan Deviasi
Halaman III DIPA
14 Agustus 2023

September

9



FGD Tindak Lanjut Peretasan KKP
04 September 2023



Family Day Kemenkeu
13 Juli 2023



Sosialisasi Penyusunan LK Semester I
20 Juli 2023



Sosialisasi Aplikasi SAKTI Modul Piutang
16 Agustus 2023



FGD Percepatan DAK Fisik dan Dana Desa
31 Agustus 2023



Sosialisasi Rekonsiliasi dan Penyelesaian To Do List MONSAKI
14 September 2023



Service Excellent dengan Bank Muamalat
21 September 2023



Oktober

10



Sosialisasi PER-10/PB/2023 tentang LLAT
24 Oktober 2023



Puncak Peringatan Hari Oeang ke-77
27 Oktober 2023

November

11



Monev Implementasi Kebijakan Pengelolaan
dan Penggunaan DAK
02 November 2023



FGD dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
Triwulan III 2023
16 November 2023

Desember

12



Audit ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti
Penyuapan
04 - 05 Desember 2023



Kunjungan *US Treasury* OTA Advisors ke KPPN
Denpasar
05 Desember 2023



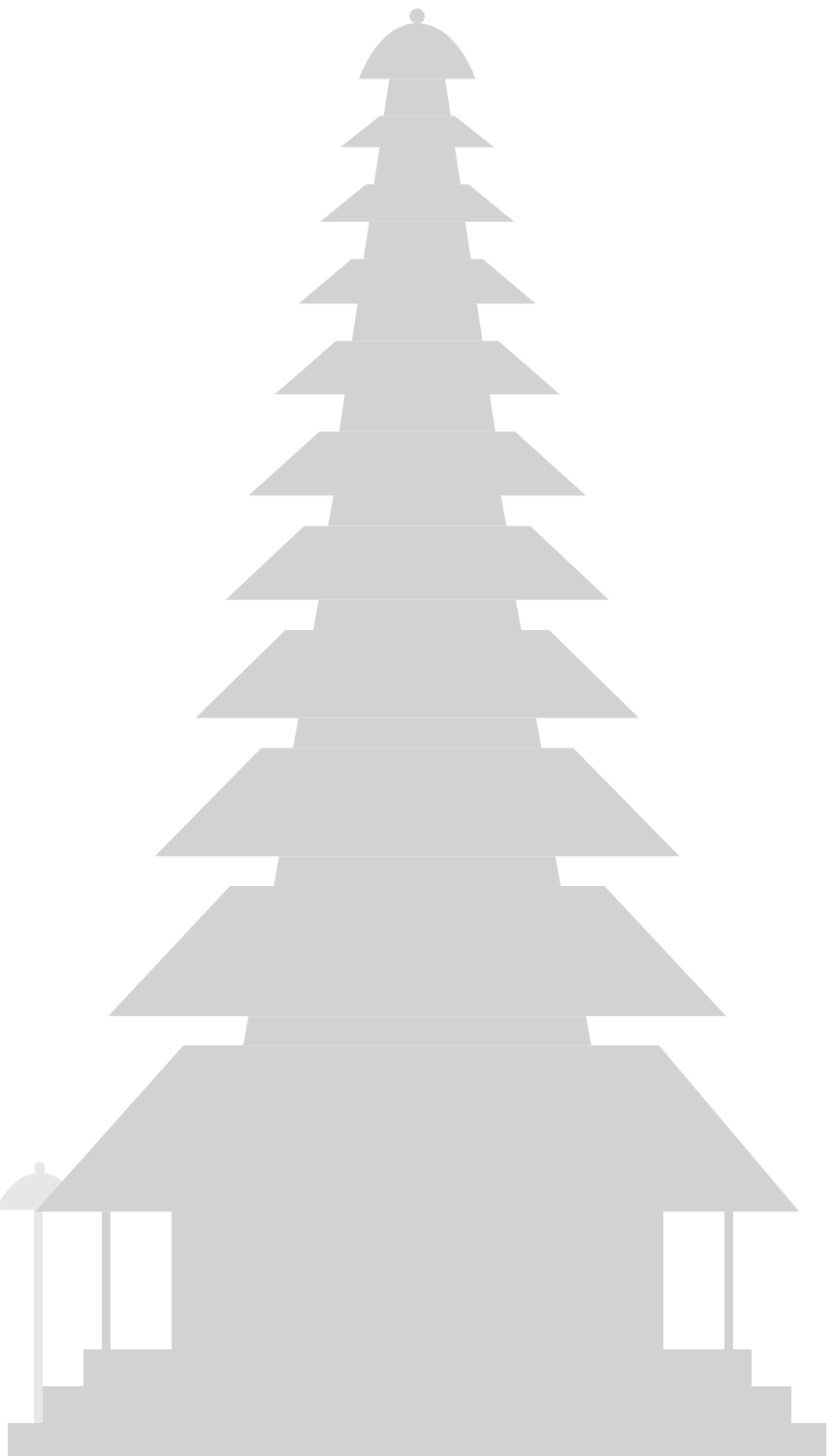
Townhall Penguatan Integritas
31 Oktober 2023



Sosialisasi CMS Bank Mandiri
30 November 2023



Dialog Sejarah dan Wawasan Kebangsaan di
Istana Tampaksiring
17 Desember 2023



Wujud Komitmen Kuat Implementasikan Layanan Tanpa Suap, KPPN Denpasar Raih Sertifikat ISO SMAP 37001:2016

KPPN Denpasar sebagai salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan selalu berupaya untuk memberikan pelayanan kepada seluruh mitra kerja secara cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan tanpa biaya dengan senantiasa mewujudkan prinsip *good governance*. Komitmen kuat KPPN Denpasar dalam mengimplementasikan zona integritas diwujudkan dengan pencapaian sebagai unit berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2019, predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 berhasil menjadi salah satu dari 8 (delapan) unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh Sertifikat *International Organization for Standardization* (ISO) Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) 37001:2016.

ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) merupakan sistem manajemen yang dirancang untuk membantu organisasi mencegah, mendeteksi, dan menanggapi penyipuan serta mematuhi undang-undang dan prosedur anti penyipuan. Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-300/PB/2021 tentang Pedoman Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyipuan ISO SMAP 37001:2016 pada Unit Kerja di Lingkungan DJPb dan merupakan bagian dari Inisiatif Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menjadi kegiatan mandatory untuk dilaksanakan unit kerja dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyipuan pada KPPN Denpasar telah dilaksanakan mulai bulan Maret tahun 2023 yang diawali dengan tahapan penetapan dokumen pedoman internal mencakup klausul 1 s.d.

klausul 10, internalisasi pedoman yang telah disusun baik secara internal maupun eksternal kepada seluruh stakeholders, dan pelaksanaan pedoman internal yang dibuktikan dengan dokumentasi yang lengkap untuk tiap klausul.





Pada tanggal 27 September 2023 KPPN Denpasar ditetapkan menjadi salah satu unit kerja yang mengikuti Audit Eksternal ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pelaksanaan Sertifikasi/*Initial Audit* terdiri dari beberapa rangkaian tahap dan agenda pelaksanaan, selanjutnya pada tanggal 4 s.d. 5 Desember 2023 dilaksanakan Audit Eksternal Stage II oleh badan sertifikasi PT. MSA Certification secara *site visit* sebagai bentuk evaluasi atas implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan berdasarkan informasi terdokumentasi serta melihat kepatuhan dan komitmen unit kerja sesuai dengan standar ISO 37001:2016.

Proses Audit Eksternal Stage II diawali dengan rapat pembuka audit yang dihadiri oleh Tim Auditor, Dewan Pengarah /Manajemen Puncak, Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP), Pengendali Dokumen, dan perwakilan Seksi/ Subbagian Umum yang dilanjutkan wawancara dengan Kepala KPPN Denpasar selaku Dewan Pengarah/ Manajemen Puncak.

Audit dilanjutkan dengan wawancara dan konfirmasi dokumen sesuai urutan klausul 1 s.d. 10 dengan perwakilan seluruh Seksi/ Subbagian Umum.

Setelah dilaksanakan wawancara dan konfirmasi kelengkapan dokumen, pada tanggal 5 Desember 2023 Tim Auditor PT. MSA Certification melaksanakan *closing meeting* dan menyampaikan rekomendasi bahwa KPPN Denpasar telah memenuhi persyaratan dalam menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai Standar ISO 37001:2016. Tim Audit memberikan rekomendasi untuk memperoleh sertifikat ISO 37001:2016 SMAP kepada KPPN Denpasar.

Dengan diperolehnya sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, diharapkan dapat menjadi salah satu *tools* tambahan untuk menjadi panduan atau pedoman seluruh pegawai di lingkungan KPPN Denpasar dalam memitigasi, mendeteksi, menangani, dan menindaklanjuti risiko yang ada secara terstruktur dan efektif dalam rangka mewujudkan *the Island of Integrity*. **(dev)**





RPATA: Transformasi Pengelolaan Keuangan untuk Meningkatkan Efisiensi dan Akuntabilitas

Jika akhir tahun sebelumnya KPPN disibukkan dengan penatausahaan jaminan pembayaran akhir tahun berupa garansi bank, akhir tahun 2023 ini ada yang berbeda di KPPN. Ya, RPATA. Dalam upaya menjaga prinsip pembayaran setelah barang/jasa diterima serta mendukung optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan anggaran yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan memperkenalkan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). RPATA adalah rekening lain-lain milik Bendahara Umum Negara (BUN) yang berfungsi sebagai wadah penampungan dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara hingga tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Rekening ini juga mencakup pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, tetapi diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. Keberadaan RPATA diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran.



Penggunaan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) memberikan sejumlah manfaat strategis dalam pengelolaan keuangan negara. Pertama, RPATA memastikan menjaga prinsip periodisitas anggaran dengan optimalisasi penyelesaian pekerjaan sesuai dengan tenggat akhir tahun anggaran. Kedua, prinsip pengeluaran negara diakomodasi dengan pembayaran yang dilakukan setelah barang/jasa diterima, mengurangi risiko kerugian negara akibat bank garansi yang gagal dicairkan atau terlambat diklaim. Ketiga, RPATA mengeliminasi keterburu-buruan dalam proses serah terima, memungkinkan penerapan SOP serah terima barang/jasa dengan baik. Keempat, penyedia barang/jasa terbebas dari beban pembuatan garansi bank, termasuk kewajiban pembayaran fee/penyediaan jaminan. Kelima, RPATA mengurangi beban administratif KPPN dalam menatausahakan dan mencairkan bank garansi. Keenam, terdapat potensi pendapatan negara dari pengelolaan saldo dana di Rekening RPL-BUN BI (Rekening Escrow). Terakhir, satuan kerja dapat menghemat waktu dan tenaga karena tidak perlu secara intensif mengonfirmasi keaslian/keabsahan dan menatausahakan bank garansi. Dengan demikian, RPATA bukan hanya menjadi



alat pengelolaan keuangan yang efektif, tetapi juga mendukung transparansi dan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara.

Pengajuan SPM dengan mekanisme RPATA terbagi atas tiga jenis SPM, yaitu SPM Penampungan, SPM Pembayaran, dan SPM Penihilan. SPM Penampungan yang pengajuannya dapat dilakukan pada tanggal 14 s.d. 21 Desember 2023 merupakan SPM yang digunakan untuk mencadangkan dana dari RKUN ke RPATA. Lalu, SPM Pembayaran digunakan untuk memindahbukukan dari RPATA ke rekening penyedia serta diajukan setelah pekerjaan selesai 100%, masa kontrak telah berakhir, atau batas waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan berakhir. Pembayaran tersebut diberikan sesuai prestasi pekerjaan. Pengajuan SPM pembayaran dilakukan paling cepat 1 hari kerja setelah SP2D penampungan dan paling lambat 5 hari kerja setelah BAPP/BAST. Terakhir, SPM Penihilan diajukan apabila terdapat pekerjaan yang tidak terselesaikan dan digunakan untuk menihilkan RPATA dengan disetor kembali ke RKUN. Pengajuan SPM Penihilan harus dilakukan paling lambat 5 hari kerja setelah masa kontrak berakhir atau batas

waktu pemberian kesempatan berakhir.

Di KPPN Denpasar sendiri, terdapat 111 kontrak yang menggunakan mekanisme RPATA. 107 di antaranya merupakan kontrak dengan sumber dana RM dan 4 sisanya bersumber dari SBSN. Total nilai kontrak tersebut sebesar Rp 778.582.026.667. Dari kontrak yang menggunakan mekanisme RPATA, jumlah nilai SP2D Pengisian RPATA adalah Rp 149.743.221.062, jumlah nilai SP2D Pembayaran RPATA adalah Rp96.765.189.177, serta jumlah SP2D Penihilan RPATA Rp4.837.786.440. Dari jumlah tersebut, terdapat 10 kontrak yang diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan pada 2024 dengan total nilai kontrak sebesar Rp48.140.245.445, dan 2 kontrak di antaranya merupakan RPATA dengan tagging pekerjaan prioritas nasional. **(unt)**



Lika-Liku Perjalanan Akhir Tahun di KPPN Denpasar

Seiring melodi lagu "libur tlah tiba, libur tlah tiba..." bergema, pikiran para pegawai khususnya seksi pencairan dana di KPPN Denpasar langsung melayang ke pertanyaan klasik, "Duh, bakal pulang jam berapa yaa?". Akhir tahun 2023 tidak hanya dihiasi oleh semangat liburan, tetapi juga bayangan akan load pekerjaan yang meningkat seiring bertambahnya jumlah SPM yang masuk melalui SAKTI. Hal ini, tentunya sudah diprediksi oleh para pegawai KPPN Denpasar jauh sebelum Desember tiba, sehingga saat bulan ini tiba pegawai sudah siap menghadapinya.





Ketika SAKTI Maintenance, KPPN Denpasar Berjuang Melawan Gelombang SPM Akhir Tahun

Lika-liku perjalanan di KPPN Denpasar saat akhir tahun 2023 tidak hanya diwarnai dengan jumlah SPM yang menggunung, melainkan juga oleh lika-liku *maintenance* pada aplikasi SAKTI dan SPAN yang membuat para pegawai betah di depan layar komputer sampai larut malam. *Maintenance* SAKTI membuat satker kesulitan untuk mengunggah ADK SPM dan bagi pegawai KPPN ini seperti menunggu badai yang menghantam, karena begitu SAKTI bisa diakses, SPM yang masuk seolah tak kunjung habis. Puncaknya terjadi pada tanggal 12 Desember 2023 (hari kerja ke-8), yang mana lebih dari 1200 SPM masuk ke SAKTI dalam satu hari. Sama seperti tahun sebelumnya, pada 2022 puncak SPM juga terjadi pada hari kerja ke-8 dan bertepatan tanggal 12 Desember 2022 juga, total SPM yang masuk lebih dari 1100 SPM. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan total SPM dari tahun sebelumnya sekitar 100 SPM namun beban kerja terasa jauh lebih berat pada tahun ini. Sebelum itu, pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, ketika pemberitahuan *maintenance* SPAN dalam rangka persiapan RPATA pada hari Sabtu dan Minggu menghiasi layar membuat kehebohan semakin merayap. Total lebih dari 1100 SPM masuk pada hari itu, membuat para pegawai KPPN Denpasar bersiap-siap untuk lembur. Determinasi untuk menyelesaikan semua SPM sebelum *maintenance* SPAN pun menjadi misi utama.

Akan tetapi, takdir berkata lain. Di tengah lembur pada hari Kamis, pemberitahuan *maintenance* SPAN muncul, menyatakan bahwa sistem akan offline mulai pukul 00.01 hingga 06.00 jumat dini hari. Gelak tawa dan raut wajah campur aduk melukiskan kegelisahan yang dirasakan para pegawai yang belum menyelesaikan tugasnya. Belum lagi dengan batas-batas

jenis SPM yang hampir setiap hari menantang kehebatan para pegawai. Seakan tak kenal lelah, KPPN Denpasar berjuang melawan gelombang SPM dan *maintenance* sistem. Kehectican akhir tahun seakan menjadi ujian sejati bagi keuletan dan semangat tim di balik layar komputer.

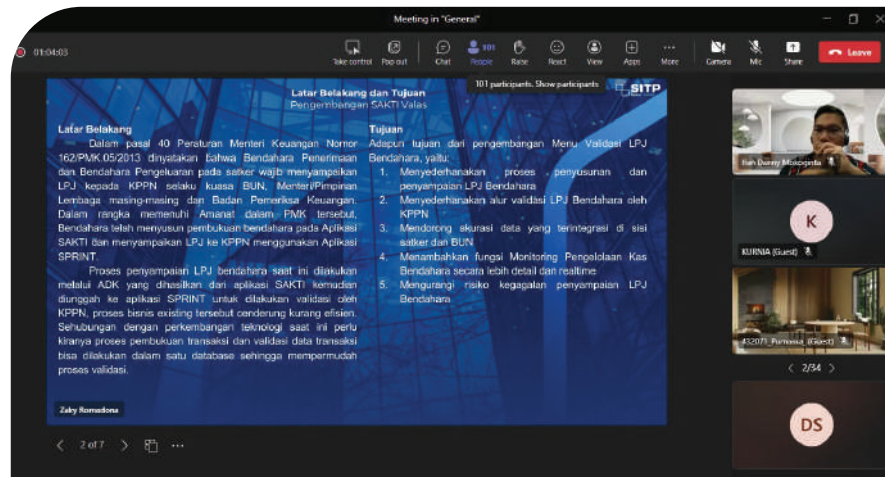
Tak hanya itu, kejadian unik terjadi kembali pada hari kerja terakhir tahun 2023. Bukan masalah SPM yang masih belum selesai diproses, melainkan menunggu SPM Dana Bagi Hasil (DBH) yang bahkan belum dapat diproses oleh satuan kerja (satker) KPPN Denpasar Penyalur Dana Transfer Umum. Dari dua ADK SPM yang akan dikirimkan oleh satker, satu ADK SPM berhasil dikirim dan langsung diproses oleh KPPN pada pukul 22.23. Namun sayang, pembuatan satu ADK SPM lainnya terhambat karena belum tersedia data dari pusat hingga pukul 01.00 dini hari. Dengan terpaksa pegawai mengemasi barang-barangnya dan pulang menuju rumah masing-masing pada dini hari dengan perasaan kecewa. Keesokan harinya pada tanggal 30 Desember, akhirnya SPM DBH berhasil dikirim pada pukul 16.21 dan diproses pegawai serta langsung diproses oleh KPPN pada saat itu juga.

Meski penuh tantangan, cerita ini juga mencerminkan kekompakan dan semangat kolektif yang membara di KPPN Denpasar. Sebuah kisah yang mengingatkan bahwa di balik layar hitam putih aplikasi dan sistem, ada tim penuh semangat yang siap melawan segala rintangan. Sebuah akhir tahun yang tak terlupakan bagi KPPN Denpasar, diwarnai oleh perjuangan, tawa, dan tekad untuk menyelesaikan setiap tugas dengan penuh dedikasi. **(int)**

Simplifikasi Proses Bisnis: Penyampaian dan Validasi LPJ Bendahara melalui Aplikasi SAKTI

Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN, disebutkan bahwa Bendahara wajib menyampaikan LPJ Bendahara ke KPPN paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelumnya, penyampaian dan validasi LPJ Bendahara ke KPPN dilakukan melalui Aplikasi SPRINT. Seiring dengan berjalannya perkembangan teknologi, maka penyampaian dan validasi LPJ Bendahara mengalami simplifikasi proses bisnis yaitu melalui Aplikasi SAKTI. Pelaksanaan migrasi dari Aplikasi SPRINT ke Aplikasi SAKTI dilakukan secara bertahap. Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-170/PB/PB.3/2023, *piloting* tahap I dilakukan untuk periode LPJ Bendahara bulan September 2023 meliputi satuan kerja lingkup Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. KPPN Denpasar telah menginformasikan kepada para satuan kerja *piloting* tahap I mengenai sosialisasi petunjuk teknis penyampaian dan validasi LPJ Bendahara melalui Aplikasi SAKTI yang diagendakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara secara daring pada hari Selasa, 26 September 2023.

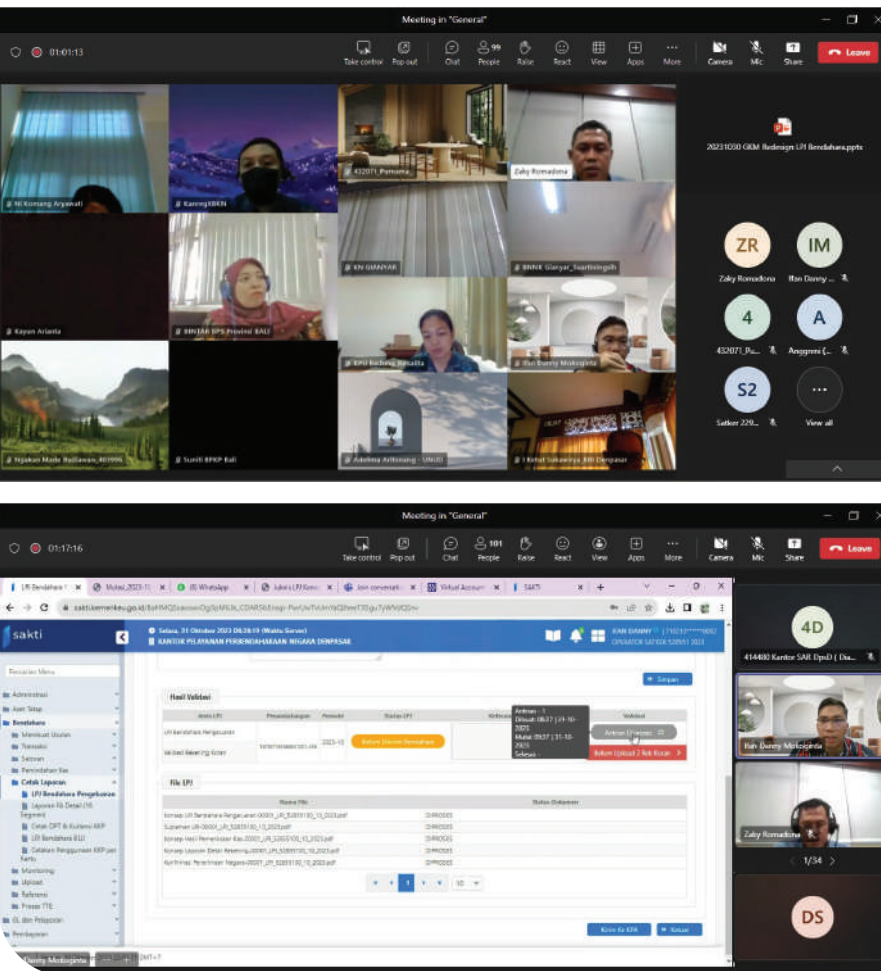
Selama pelaksanaan *piloting* tahap I, terdapat beberapa kendala yang dialami oleh satuan kerja antara lain para operator masih asing dengan menu-menu baru yang muncul pada Aplikasi SAKTI sehingga perlu pembiasaan terhadap pengoperasian menu dan tata cara baru ini. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh satuan kerja sebagian



besar sudah tercantum dalam petunjuk teknis sehingga perlu diberikan pemahaman lebih lanjut. KPPN Denpasar melakukan pendampingan kepada satuan kerja *piloting* tahap I secara intensif sehingga tidak ada satuan kerja yang terlambat pada penyampaian LPJ Bendahara bulan September 2023.

Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-180/PB/PB.3/2023, pelaksanaan *piloting* tahap II dilakukan untuk periode LPJ Bendahara bulan Oktober 2023. Satuan kerja *piloting* tahap II terdiri dari 76 Kementerian/Lembaga. Sampai dengan *piloting* tahap II, jumlah satuan kerja yang wajib LPJ menggunakan Aplikasi SAKTI sebanyak 136 satuan kerja. KPPN Denpasar melaksanakan sosialisasi *piloting* tahap II pelaksanaan penyampaian dan validasi LPJ Bendahara melalui Aplikasi SAKTI secara daring pada hari Selasa, 31 Oktober 2023.

Kendala yang dialami satuan kerja pada *piloting* tahap II sebagian besar sama dengan pelaksanaan *piloting* tahap I. Hal ini menjadi perhatian khusus sehingga KPPN Denpasar secara aktif mendampingi para satuan kerja baik secara daring melalui Aplikasi WhatsApp dan Telegram maupun secara luring melalui konsultasi tatap muka di ruang layanan KPPN Denpasar. Selain itu, pendampingan teknis secara daring juga diselenggarakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara bersama dengan



Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan. Pada pelaksanaan *piloting* tahap II pun tidak ada satuan kerja lingkup KPPN Denpasar yang terlambat menyampaikan LPJ Bendahara.

Selain penyampaian LPJ Bendahara yang bermigrasi dari Aplikasi SPRINT ke Aplikasi SAKTI, pada menu cetak laporan Aplikasi SAKTI terdapat beberapa fitur baru yang dapat dimanfaatkan oleh bendahara antara lain otomatisasi konfirmasi penerimaan negara dan suplemen LPJ Bendahara. Fitur otomatisasi konfirmasi penerimaan negara ini mempermudah bendahara dalam melakukan konfirmasi. Bendahara tidak perlu menyampaikan ADK Konfirmasi Penerimaan Negara melalui KPPN. Seluruh setoran penerimaan negara akan terkonfirmasi melalui fitur ini. Sedangkan fitur suplemen LPJ Bendahara dapat

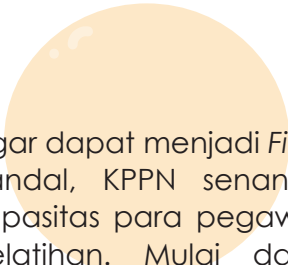
digunakan sebagai salah satu alat untuk menjaga tingkat kepatuhan bendahara, sebagai bahan pertimbangan KPA/PPK sebelum Approve LPJ, dan sebagai bahan pembinaan KPPN kepada satuan kerja Kepatuhan bendahara dapat dilihat pada tingkat kepatuhan penyetoran pajak, pembayaran dana LS, jumlah kas tunai yang tidak boleh lebih dari 50 juta tiap akhir hari, dan validasi data rekening.

Simplifikasi proses bisnis penyampaian dan validasi LPJ Bendahara melalui Aplikasi SAKTI ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan bendahara dalam mengelola uang yang dikelolanya dan keandalan data pada LPJ Bendahara yang disampaikan oleh bendahara satuan kerja dapat terjaga. **(gys)**



Sebelum reformasi keuangan negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah sangat identik dengan tugas bendahara dalam mengeluarkan dana atau melakukan pembayaran atas transaksi tertentu. Dengan tugas dan fungsi KPPN untuk menyalurkan pembiayaan atas beban APBN tersebut, menyebabkan "image" sebagai kasir sangat melekat pada KPPN.

Dengan adanya reformasi Keuangan Negara yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, KPPN berhasil mengubah pencitraan tersebut. Kini KPPN telah menguatkan perannya menjadi "bestie" dari satuan kerja melalui peran *Financial Advisor*. Tidak hanya satker Kementerian/Lembaga, tetapi juga satker Pemda yang mengelola dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, dan Dana Transfer ke Daerah. Dalam pengertian secara umum, *Financial Advisor* adalah profesional yang membantu individu dalam mengelola keuangan. Dalam mengelola APBN, KPPN terus menguatkan perannya untuk mendampingi satker K/L dan Pemda, mulai dari sisi perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan sisi pelaporan dan pertanggungjawaban. Sebagai seorang "bestie", KPPN selalu memberikan saran dan masukan, serta mengingatkan satker apabila terdapat potensi-potensi permasalahan yang akan terjadi dalam mengelola APBN.



Agar dapat menjadi *Financial Advisor* yang handal, KPPN senantiasa meningkatkan kapasitas para pegawai melalui berbagai pelatihan. Mulai dari pelatihan teknis pengelolaan keuangan negara, pelatihan *service excellence*, hingga pelatihan keterampilan lainnya seperti *data analytic*, *data design*, dan lain-lain untuk menunjang para pegawai. Hal tersebut dilaksanakan, untuk memastikan bahwa tidak hanya *Customer Service Officer (CSO)* yang dapat menjadi "bestie" satker, melainkan seluruh pegawai juga harus dapat menjadi rekan *sharing* bagi satker.

Dengan pemerataan kemampuan para pegawai tersebut, pelaksanaan tugas *Financial Advisor* pada KPPN dapat dilakukan secara *collaborative* lintas Subbagian dan Seksi. Pelaksanaan tugas tersebut dimulai dari pelaksanaan pemetaan atau *profiling* satker untuk mengetahui karakter satker, dalam rangka memberikan "treatment" yang tepat sesuai dengan kebutuhan satker. Selanjutnya, dalam mendampingi satuan kerja dalam mengelola anggarannya, KPPN kerap melaksanakan berbagai kegiatan seperti sosialisasi, *focused group discussion*, kegiatan monev, dan pendampingan intensif lainnya guna memastikan satker memahami dan dapat melaksanakan seluruh kebijakan *mandatory* dan *complementary* dalam pengelolaan APBN.





Tak Hanya Kasir, KPPN Kini “Bestie” Satker K/L dan Pemda

Oleh : Made Pradnyaniti C. D.



Untuk dapat mengelola keuangan dengan baik, KPPN selalu mendorong satker untuk mengikuti pelaksanaan sertifikasi PPK, PPSPM, dan Bendahara, serta membantu satker selama proses persiapan sertifikasi. Disamping itu, KPPN melaksanakan kegiatan pembinaan pada satker dengan membantu satker dalam menyusun langkah-langkah strategis dalam menjaga kualitas kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA), memberikan asistensi untuk mengubah budaya konvensional menjadi budaya *cashless*, serta memberikan opsi-opsi yang dapat diambil apabila satuan kerja menemukan kendala.

Pada KPPN Denpasar, penguatan peran *Financial Advisor* dilaksanakan dengan berbagai cara. Pertama, KPPN Denpasar menyediakan berbagai kanal konsultasi seperti layanan tatap muka *front office* CSO, HAI CSO OMSPAN, grup telegram Forum Diskusi Satker, Telpon CSO dan inovasi Layanan Konsultasi *Online*

“CussOn”. Kedua, KPPN Denpasar juga menunjang pelayanan kepada satker dengan berbagai inovasi seperti Penjor037 (Perbincangan Kinerja Stakeholder KPPN Denpasar, Salak Bali (Sapa Lewat Angkasa Bali), serta Desi037 (Video Singkat Informasi 037). Selain itu, KPPN Denpasar memanfaatkan fungsi Ruang *Mini Treasury Learning Center* (TLC), sebagai ruang pelayanan intensif bagi satuan kerja untuk menganalisis lebih dalam permasalahan dan kendala baik permasalahan yang berkaitan dengan IT maupun kebijakan.

Dengan menjadi “bestie” bagi satker K/L dan Pemda, diharapkan satker tidak perlu sungkan lagi mengkomunikasi segala kendala yang dihadapi. Satker diharapkan dapat meningkatkan sinergi dan koordinasi, sehingga KPPN dan satker dapat bersama-sama menyusun mitigasi yang diperlukan dalam mengelola APBN.



**DUKUNG KPPN DENPASAR UNTUK TERUS MENJAGA
KEBERLANJUTAN PREDIKAT ZONA INTEGRITAS
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DAN ISO 37001:2016
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)**

**SELURUH LAYANAN KPPN DENPASAR
TIDAK DIPUNGUT BIAYA**

Layanan Pengaduan



wise.kemenkeu.go.id



pengaduandjpb.kemenkeu.go.id



lapor.go.id



08113999037



email : kepatuhan.internal037@gmail.com



<https://bit.ly/ORAHIN037>



Optimalisasi Penyaluran Usaha Mikro (UMi) untuk Pertumbuhan Perekonomian Sarbagita

Pemberdayaan UMKM adalah bagian integral dari upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan penajaman tugas KPPN sebagai *Treasury, Regional Economist and Financial Advisor (TREFA)* di daerah dalam bentuk peran nyata KPPN yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam konteks ini, peran KPPN sangat penting dalam membangun pondasi keuangan yang kokoh bagi UMKM. KPPN menjadi pendamping dalam edukasi keuangan, bantuan administrasi, pelatihan, pemantauan, dan kolaborasi dengan pihak terkait, KPPN dapat membantu UMKM mengatasi tantangan keuangan dan administrasi yang mereka hadapi. Sehingga, bentuk peran KPPN ini diharapkan dapat berlangsung secara kontinu dan menghasilkan UMKM yang berkualitas yang memajukan roda perekonomian di Indonesia.

Delis Chiffon Cake

Delis Chiffon Cake adalah sebuah usaha kue rumahan yang dikelola oleh Ibu Ida. Berbagai jenis kue yang diproduksi antara lain Chiffon Cake, Lapis Surabaya, dan Lapis Mandarin. Setiap harinya, Ibu Ida dibantu oleh 4 orang karyawannya mampu memproduksi 200 loyang Chiffon Cake dan 20 loyang Lapis Surabaya. Namun, untuk Lapis Mandarin, Ibu Ida hanya memproduksi dua kali seminggu, pada hari Kamis dan Minggu. Harga yang ditawarkan cukup terjangkau berkisar antara Rp2.000/potong sampai dengan

Rp75.000/ kotaknya. Untuk rasa sudah tidak perlu diragukan lagi, karena Ibu Ida sudah puluhan tahun menggeluti usaha kue ini. Banyak pelanggannya yang memesan untuk keperluan acara tertentu bahkan juga sebagai kudapan ringan untuk menemani hari-hari. Ibu Ida pernah membuka Toko Delis Chiffon Cake di Kawasan Sesetan, namun beliau terpaksa harus menutup toko tersebut karena pandemi COVID-19 di 2020 silam. Jika ingin merasakan lezatnya Cake ini, Anda dapat menghubungi kontak di bawah ini.



Lokasi : Jl. Palapa VIII No.1C, Sesetan,
Denpasar Selatan, Kota Denpasar



Contact Person : Ibu Ida 081353032626



Tenun Ikat Sri Sedana

Usaha Pertenunan Ikat Sri Sedana bergerak di sektor produksi kain endek khas Bali. Dibangun sejak tahun 1984, usaha ini lebih dikenal dengan nama Tenun Ikat "Sri Sedana". Terdapat dua jenis kain endek diproduksi di tempat ini, yakni Kain Endek Katun dan Kain Endek Sutra. Usaha ini awalnya dirintis oleh I Wayan Resep, kemudian diwariskan kepada anaknya, Ni Wayan Setiasih dan masih terus berlanjut sampai sampai sekarang. Dalam proses produksinya, Ni Wayan Setiasih dibantu oleh 4 orang penenun asli Bali. Dalam sehari, seorang penenun mampu menghasilkan kain tenun menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) kurang lebih 2 meter dengan durasi kerja selama 8 jam. Kain endek yang diproduksi oleh Pertunenan Sri Sedana memiliki ciri khas tersendiri, desain kain memiliki motif dan "pepatran" (cetakan) khusus khas Sukawati yang tidak dimiliki pertunenan





**Lokasi : Jl. Pantai Purnama,
Banjar Palak, Kec. Sukawati,
Kabupaten Gianyar**



**Contact Person : Ibu Ni Wayan
Setiasih 08175411999/
081338061222**



Instagram : srsedana_tenun

Beliau mencoba memasarkan secara aktif melalui Instagram dan website, sehingga para penggemar dan pembeli kain tenunnya tetap bisa melakukan transaksi. Selain itu, Ni Wayan Setiasih juga mengatakan kini usahanya sudah mulai berangsur pulih kembali berkat adanya bantuan program UMI yang disalurkan oleh KSP Jujur Utama Mandiri (JUMARI). **(avd)**

lain. Pertenunan Ikat Sri Sedana kerap mengikuti ajang pameran tingkat nasional bahkan internasional. Anda dapat melihat koleksi tenun ikat Sri Sedana secara langsung dengan mengunjungi *workshop* mereka di Jalan Pantai Purnama, Br. Palak, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau di Pameran IKM Bali Bangkit, Art Centre Denpasar.

Pertenunan Ikat Sri Sedana mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19, berkat kegigihan Ni Wayan Setiasih dan suaminya dalam memasarkan produknya.





AYO SEGERA ...

LAKUKAN PEMADANAN NIK-NPWP



4 Langkah Mudah

1

Login di
pajak.go.id
pakai NPWP

2

Buka Tab
Profil

3

Masukkan NIK
Sesuai KTP

4

Klik Tombol

Validasi

Tutorial lengkap
tonton di



<https://bit.ly/TutorialNIK-NPWP>





Teka Teki Silang

- Syarat dan Ketentuan**
1. Kirim jawaban Anda berupa foto halaman TTS ke alamat email kecakbali.037@gmail.com dengan subyek LOMBATTSKECAK Vol. 1 2024.
 2. Jawaban disertai data diri berupa nama,nomor telepon, alamat dan email.
 3. Jawaban paling lambat diterima pada pukul 23.59 WIB Tanggal 30 Juni 2024.
 4. Nama pemenang akan diumumkan pada Majalah Kecak Bali edisi berikutnya.
 5. Hadiah dikirim ke alamat pemenang sesuai alamat yang diberikan dan konfirmasi melalui telepon.

- Mendatar**
1. Salah satu alokasi dana Transfer ke Daerah
 2. Aplikasi untuk proses Uang Makan dan Uang Lembur
 3. Belanja pengadaan mobil dinas
 4. Modul SAKTI untuk menyusun LPJ
 5. Sistem Manajemen Anti Penyuapan

- Menurun**
1. Memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral
 2. Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran
 3. Himpunan Bank Milik Negara
 4. Perjanjian, kesepakatan, perikatan dalam PBJ
 5. Tempat menyaksikan Tari Kecak Bali

**Selamat untuk pemenang Kecak Bali Vol.1 2023
Kak Fatwa (fatwaspensa@gmail.com)**

Meet The Team



Trimo Yulianto
Penanggung Jawab



Totok Iman Santoso
Pemimpin Redaksi



Made Pradnyaniti C. D.
Kontributor



Adella Gysta A. P.
Kontributor



Aveda Astyayustina
Kontributor



Mirza Nurullita
Kontributor



Nadhelia Sesar T. S.
Kontributor



Untea Amalia C.
Kontributor



Embun Nurani W.
Layout dan Desain



Devika Yulan S.
Kontributor



Intan Radha H.
Kontributor



Galuh Ajeng A. P.
Layout dan Desain